

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah membuat pengangguran semakin banyak, inflasi juga naik dan pertumbuhan ekonomi melambat. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu Negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada.

Bangsa Indonesia perlu mewaspadaai kondisi kemiskinan yang terjadi saat ini. Walaupun secara statistik tahun 2012 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 28,59 juta orang atau 11,6 persen secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis. Badan Pusat Statistika mencatat, indeks keparahan pada Maret 2012 sebesar 0,36. Padahal, pada September 2012 menjadi 0,61. Kenaikan indeks ini menunjukkan dua hal, yaitu semakin melebarnya kesenjangan antarpenduduk miskin dan juga semakin rendahnya daya beli dari masyarakat kelompok miskin karena ketidakmampuan mereka memenuhi

kebutuhan dasar untuk hidup sampai dengan batas pengeluaran garis kemiskinan yang hanya sebesar Rp 259.520 perbulan. (BPS, 2016)

Jumlah dan persentase penduduk miskin dan di Provinsi Riau pada periode September 2012 – September 2017 menunjukkan kecenderungan berfluktuatif. Jumlah penduduk miskin pada periode September 2012 sampai dengan September 2013 cenderung mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada September 2015, sedangkan periode September 2016 ke September 2017 mengalami penurunan. Selama periode September 2012 – September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat dari 154,83 ribu jiwa pada September 2012 menjadi 176,98 ribu jiwa pada September 2017. Hal sebaliknya terjadi pada jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan, menurun dari 321,63 ribu jiwa menjadi 319,41 ribu jiwa pada periode yang sama. Jika dilihat besaran persentasenya, penduduk miskin di Provinsi Riau dapat dikatakan mengalami penurunan selama periode September 2012 ke September 2017, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau Menurut Daerah,
September 2012 - September 2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
2012	154,83	321,63	476,46	6,68	8,93	8,05
2013	159,27	352,20	511,47	6,68	9,55	8,42
2014	159,53	338,75	498,28	6,53	8,93	7,99
2015	174,79	338,13	562,92	7,05	9,95	8,82
2016	164,12	337,47	501,59	6,38	8,51	7,67
2017	176,98	319,41	496,39	6,55	7,99	7,41

Sumber: BPS Riau 2018

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Riau September 2016-September 2017 penduduk miskin di Riau pada bulan September 2017 sebesar 496,39 ribu jiwa atau sebesar 7,41 persen dari jumlah penduduk Riau. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 5,20 ribu jiwa jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 yang berjumlah 501,59 ribu jiwa atau 7,67 persen dari jumlah penduduk Riau. Besar kecil jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK) karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Semakin tinggi GK, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin. Dengan mencermati Tabel 2, Garis Kemiskinan (GK) di Riau naik sebesar 6,39 persen yaitu Rp. 437.259,- per kapita per bulan pada bulan September 2016 menjadi Rp. 465.181,- per kapita per bulan pada September 2017. Dengan memperhatikan komponen GK, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) peranan GKM terhadap GK pada September 2017 mencapai 73,59 persen sedangkan peranan GKNM terhadap GK hanya sebesar 26,41 persen. (1, 2018)

Presentase penduduk miskin di Provinsi Riau dari 2013-2017 menunjukkan kecenderungan menurun. Permasalahan yang di uraikan di atas, tingkat kemiskinan di Provinsi Riau yang relatif masih tinggi menjadi fokus dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini juga bermaksud untuk mengkaji

faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau yaitu kualitas hidup manusia yang di cerminkan melalui angka IPM, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.

Berdasarkan penelitian Sukmarga (2011), IPM memiliki peranan dalam mengurangi kemiskinan. Dengan meningkatkannya kualitas hidup manusia maka akan meningkat, sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor pengurang terjadinya penduduk miskin. Angka IPM mencakup tiga komponen dasar yang mengukur kualitas hidup manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak di dalam masyarakat. Angka IPM yang semakin meningkat menandakan kualitas hidup manusia yang semakin tinggi yang digambarkan dengan adanya peningkatan kesehatan yang di cerminkan dari tingkat pendidikan serta peningkatan kehidupan yang layak, maka hal ini dapat pula meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya masyarakat tersebut akan dapat keluar dari lingkungan kemiskinan. Serta mewujudkan upaya pembangunan suatu negara.

Menurut Maryanti (2009), Hasil penelitian adalah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau meningkat namun kontribusi sektor A (*Agriculture*) menurun digantikansektor M (*Manufacture*) dan sektor S (*Service*) semakin tinggi, tingkat kemiskinan paling banyak adalah dari sektor A (67, 49%) kemudian sektor S (21,40%) dan sektor M hanya 4,11%

Menurut Samarta (2014), Pertumbuhan ekonomi merupakan hal terpenting dalam penurunan kemiskinan disuatu wilayah, sebab dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnyadan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan pokok permasalahan dalam kehidupan ekonomi semua Negara. Kondisi Pemerintah Daerah bergantung pada tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan yang dicapai.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode 2013-2017 menunjukkan kinerja yang kurang baik. Pengamat ekonomi di Riau, Dr Viator Butarbutar, mengatakan, berdasarkan data BPS Riau menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi Riau turun drastis pada periode 2014-2017. Padahal pertumbuhan ekonomi pada 2011 masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,57 persen, namun pada 2014 turun jauh menjadi 2,62 persen. Penurunan angka pertumbuhan terutama di sektor primer, khususnya sub sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan migas. Tetapi terlihat kecenderungan kelesuan pada sektor hotel dan restoran serta jasa keuangan dan asuransi. Pukulan terberat Riau adalah dialami sektor pertambangan yang turun absolut drastis, dari nilai PDRB sekitar Rp70 triliun pada triwulan I pada 2014, menjadi Rp48 triliun pada triwulan I 2015.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu prioritas pembangunan suatu negara pula, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung pertumbuhan produk domestik bruto adalah rangkuman aktivitas ekonomi suatu masyarakat selama periode waktu tertentu. Dengan meningkatnya aktivitas

ekonomi maka akan meningkatkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat yang akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

1. Derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup (*life expectancy rate*), parameter kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, mengukur keadaan sehat dan berumur panjang.
2. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf rata-rata lamanya sekolah, parameter pendidikan dengan angka melek huruf dan lamanya sekolah, mengukur manusia yang cerdas, kreatif, terampil, dan bertaqwa.
3. Pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*), parameter pendapatan dengan indikator daya beli masyarakat, mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk layak.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Bappeda, 2011). Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran ini dapat mempengaruhi nilai IPM.

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah minimum regional (UMR). Upah minimum ini merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industry yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Bappeda. 2010).

Menurut Renta Yustie (2017) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Penelitian yang dilakukan oleh Patryano (2016) di Sumatera Utara. Penelitian menjelaskan adanya pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan. Penduduk yang banyak harus terserap di lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran sehingga pendapatan mereka secara tidak langsung mengurangi kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup karena rendahnya dan tidak memiliki pendapatan.

Masalah lainnya yang terus-menerus mendapat perhatian dari pemerintah adalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah, karena sukar untuk dicapai. Tujuan kebijakan menjaga tingkat inflasi tetap rendah karena adakalanya tingkat inflasi sangat tinggi atau meningkat secara tiba-tiba. Meningkatnya inflasi diluar ekspektasi pemerintah akibat suatu peristiwa tertentu, misalnya ketidakstabilan politik, Sukirno (2006).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai ”**Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau ?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau?
4. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Riau ?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh dari variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau
2. Untuk menganalisis pengaruh dari variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari variabel Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau

4. Untuk menganalisis pengaruh dari variabel Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai sumber masukan kepada pemerintah Provinsi Riau dalam hal membuat program dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan daerah khususnya dalam hal pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.
2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan bahan belajar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi pada umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi pada khususnya.
3. Sebagai masukan bagi peneliti-peneliti yang lain dengan tipe penelitian sejenis